

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

The Effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Original Income, Capital Expenditures on Economic Growth

Karmen Marpaung ¹⁾, Dedi Takari ²⁾, Cici D Ompusunggu ³⁾
^{1), 2), 3)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan periode 5 tahun. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Dokumen yang menjadi sumber utama data dapat dilihat pada Kantor Biro Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PAD dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil Studi ini juga menunjukkan pentingnya peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan realisasi penerimaan daerah untuk meningkatkan produktivitas publik misalnya penyediaan infrastruktur yang merata baik di desa maupun di kota.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This research uses quantitative research. The data used in this study are secondary data with a period of 5 years. The data collection method uses literature study method. Documents that are the main source of data can be seen at the Central Bureau of Statistics of each Regency / City in Central Kalimantan. The data analysis used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the DAU and DAK do not have a significant effect on economic growth, while PAD and capital expenditures have a significant effect on economic growth. The results of this study also show the importance of the role of local governments in managing and utilizing the realization of regional revenues to increase public productivity, for example the provision of equitable infrastructure both in villages and in cities.

Keywords: General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Original Regional Income, Capital Expenditures, Economic Growth

I. PENDAHULUAN

Dalam suatu perekonomian sangat dibutuhkan peran serta pemerintah untuk melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Melalui Desentralisasi fiskal, pemerintah memiliki wewenang untuk menggali hasil pendapatan daerah dan melakukan alokasi mandiri untuk memprioritaskan dalam hal pembangunan, dengan harapan dapat meratakan pembangunan disegala wilayah dengan potensi masing-masing sesuai keinginan daerah. (Abdul, 2003) Pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu peningkatan PAD, DAU dan DAK selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan peningkatan PAD, DAU dan DAK tersebut harus berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi daerah, namun daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD, DAU dan DAK. Keberhasilan peningkatan PAD, DAU dan DAK hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya dalam pertumbuhan ekonomi.

Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap berjalannya sebuah pemerintahan daerah

yang baik (*Good Governance*), maka sudah seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan belanja daerah bagi kepentingan publik khususnya belanja modal bagi sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan atau infrastruktur yang terlihat dari realisasi anggaran belanja daerah, dimana alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik, namun yang terjadi selama ini adalah bahwa lebih banyak belanja daerah digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif, seperti misalnya adalah belanja pegawai (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur) dan 1 kota (Kota Palangka Raya) yang juga ikut serta dalam desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia, sehingga setiap daerahnya berhak menentukan kondisi daerah termasuk Pertumbuhan Ekonomi. Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006). Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi yang juga ikut melaksanakan

otonomi daerah, dimana hak pengelolaan potensi dan pembangunan daerah sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah. Agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih meningkat maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk lebih meningkatkan pendapatannya dengan diberikan wewenang sepenuhnya mengelola potensi yang ada di daerah tersebut. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi. Namun terjadi perbedaan di setiap Kabupaten/Kota dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada Kabupaten Gunung Mas yaitu mencapai 7,29 persen pada tahun 2019 sedangkan yang berada dalam posisi terendah yaitu Kabupaten Barito Selatan yaitu mencapai 4,23 persen pada tahun 2019 (Tabel 1). Todaro (2003) mengatakan bahwa apabila laju pertumbuhan ekonomi secara material meningkat maka keberhasilan pembangunan akan tercapai namun akan muncul permasalahan ketimpangan hasil pembangunan.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah

	2015	2016	2017	2018	2019
Kotawaringin Barat	7,32	5,58	6,80	6,46	5,79
Kotawaringin Timur	7,66	7,93	7,94	6,93	7,16
Kapuas	7,27	7,29	7,62	7,01	7,16
Barito Selatan	5,54	5,63	5,44	5,12	4,93
Barito Utara	5,29	5,48	6,01	5,95	5,42
Sukamara	6,01	6,12	6,27	6,17	6,05
Lamandau	6,76	6,69	6,70	6,86	6,88
Seruyan	5,17	5,12	5,18	5,21	5,19
Katingan	6,53	6,54	6,56	6,59	5,81
Pulang Pisau	7,71	6,06	5,83	5,94	6,37
Gunung Mas	6,96	7,00	6,63	6,87	7,29
Barito Timur	5,16	5,50	5,98	5,71	5,45
Murung Raya	6,88	5,76	5,87	5,61	5,94
Palangka Raya	7,19	6,92	6,99	7,12	7,17

Sumber data: BPS Kalimantan Tengah

Tingkat pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. (Jhingan, 2014).

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Namun yang terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja daerah pada wilayah tersebut. Adanya tekanan fiskal sejak diberlakukannya otonomi daerah karena dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola

keuangan sendiri dan daerah harus dituntut untuk lebih mandiri sehingga Pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah lebih berfokus dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Adanya masalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditunjukkan pada fenomena yang dialami kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah apabila tidak di selesaikan dengan cepat akan menyebabkan masalah makro ekonomi dalam jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang di lakukan adalah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan variabel penelitian diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal dengan pertimbangan bahwa

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang meskipun menerapkan otonomi daerah namun perbedaan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota mengalami kesenjangan pembangunan antar daerah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel, yaitu gabungan dari data time series dan *crosssection* dari masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dengan periode waktu 5 tahun yaitu tahun 2015-2019.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pangkat kuadrat terkecil biasa atau *Ordinary Least Square* (OLS). Inti metode *Ordinary Least Square* (OLS) adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Kuncoro, 2007: 79). Untuk menganalisis pengaruh DAU, DAK, PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, digunakan pendekatan model persamaan regresi linier berganda dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS. dengan persamaan sebagai berikut (Imam Ghozali, 2011):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Keterangan:

Y = Jumlah PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019

X₁ = Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota 2015-2019

X₂ = Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota 2015-2019

X₃ = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota 2015-2019

X_4 = Belanja Modal Kabupaten/Kota 2015-2019

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

μ = Error Term

Selanjutnya persamaan regresi tersebut akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan data yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dapat membangkitkan sektor-sektor ekonomi produktif seperti ketersediaan sektor-sektor lapangan usaha melalui penggunaan faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan barang maupun jasa (Elsera, 2017). Beberapa daerah memiliki rasio kemandirian fiskal tinggi, sedangkan sebagian besar lainnya masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Proporsi dana transfer ke daerah masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), dan terbesar kedua adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kemudian di ikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah untuk menyediakan layanan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen fiskal di daerah. Alexandra.H (2020).

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial. Data yang diperoleh kemudian di transformasi dalam bentuk *Logaritma*

Natural (LN) dengan perangkat lunak *SPSS* dan setelah ditransformasi ke LN. Untuk mengetahui Analisis Regresi Linier Berganda data kemudian diolah menggunakan program statistik yaitu Aplikasi *SPSS 18*. Metode pengumpulan data, menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Dokumen yang menjadi sumber utama data dalam penelitian ini adalah APBD masing-masing Kabupaten/Kota, buku BPS Kalimantan Tengah dalam angka, PDRB masing-masing Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah. Data-data tersebut diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-15.257	5.120		-2.980	.004
LN_DAU	.275	.224	.153	1.227	.224
LN_DAK	.051	.136	.046	.376	.708
LN_PAD	.296	.116	.315	2.561	.013
LN_BM	.503	.209	.267	2.409	.019

Sumber: Hasil Pengolahan *SPSS 18*

Pada tabel 2 berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat kita ketahui bahwa:

1. Konstanta (α) sebesar -15.257, menyatakan bahwa variabel independen dianggap konstan yang berarti jika Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal sama dengan 0 maka Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah akan sebesar -15.257
2. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X_1) sebesar 0.275 tidak signifikan pada (α) = 0.05 ini berarti bahwa apabila

terjadi kenaikan dalam DAU sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.275% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan

3. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X2) sebesar 0.051 tidak signifikan pada $(\alpha) = 0.05$ ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan DAK sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.051% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan.
4. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) sebesar 0.296 signifikan pada $(\alpha) = 0.05$ ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan PAD sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.296% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan
5. Koefisien regresi variabel Belanja Modal (X4) sebesar 0.503 signifikan pada $(\alpha) = 0.05$ ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan Belanja Modal sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.503% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan.
- 6.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Pada hasil penelitian ini Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Dana Alokasi Umum tidak signifikan disebabkan DAU yang diterima oleh daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan

pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sehingga peran DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seharusnya DAU yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi DAU tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran. Pemerintah daerah mengharapkan DAU dari Pusat meningkat setiap tahun, jumlahnya tidak berubah dalam tahun anggaran berjalan, Bagi pemerintah daerah perubahan DAU dalam pertengahan tahun anggaran mengakibatkan ketidakpastian alokasi APBD dan dapat mempengaruhi pencapaian output APBD.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Pada hasil penelitian ini Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Dana Alokasi Khusus tidak signifikan disebabkan oleh DAK sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadi prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. DAK tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan jembatan. Selain itu, adanya kewajiban penyediaan dana pendamping sebesar 10% dari total nilai alokasi DAK pada APBD tentunya akan menggeser sejumlah anggaran belanja tertentu yang kemungkinan sebenarnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur

sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Pada hasil penelitian ini Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tegasnya pemerintah setempat menarik Pendapatan Asli Daerah, maka akan meningkatkan pendapatan di daerah tersebut. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri akan turut membantu daerah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan yang ada di daerah, yang berarti akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga, berakibat pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Pada hasil penelitian ini Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa belanja modal membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila belanja modal naik, maka produk domestik regional bruto ikut meningkat. Sehingga, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang beralokasi pada belanja modal mampu meningkatkan aktivitas

perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Dalam penyediaan pembangunan infrastruktur publik, pemerintah daerah memberikan alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD yang dikeluarkan dari pengeluaran pemerintah telah direncanakan pada pengeluaran sosial dan ekonomi. Belanja modal mempunyai peran strategis pada kualitas layanan publik yang menumbuhkan perekonomian. Dana yang mendorong lancarnya proses sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi yang meningkat antara lain belanja jaringan, jalan, peralatan dan mesin. Selain itu, penyediaan fasilitas sosial misalnya sekolah, pelayanan kesehatan, perumahan untuk menaikkan investasi modal manusia.

V. KESIMPULAN

Dari hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan (secara statistik) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan (secara statistik) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan (Secara statistik) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan (secara statistik) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Saran untuk variabel-variabel yang tidak signifikan pada penelitian ini yaitu DAU dan DAK:

1. Beberapa daerah masih memiliki rasio kemandirian fiskal yang tinggi,

sedangkan sebagian lainnya masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Perbandingan dana transfer ke daerah masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik hal ini terkait dengan karakteristik atau jenis layanan yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya untuk pelayanan *emergency*, masyarakat tidak mementingkan efisiensi biaya tetapi lebih mengutamakan ketepatan waktu atau tindakan yang diambil untuk menjaga keamanan mereka, contoh lainnya adalah Pembangunan jalan raya dari desa menuju kota, Pembangunan jembatan yang menghubungkan satu desa ke desa yang lain untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas.

2. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti (dana bagi hasil dan lainnya).

REFERENSI

- Abdul Halim. 2003. *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat :Jakarta
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar
- Elsera, G. D. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan* (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banjarmasin).
- Iman Ghozali, 2011 ; *Ekonometrika, Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*, Badan Penerbit Program Doktor Universitas Diponegoro, Semarang
- Jhingan, M.L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Keenambelas. Jakarta: Rajawali
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Erlangga
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat
- Tiawon, H. and Hukom, A., 2020. Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 1(1), pp.40-45.
- Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Kerja* (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Saggaf. (1999). *Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan ekonomi di Kotamadya, Pekan Baru*